



Pemerintah
Kota Denpasar

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN
2025



Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Denpasar



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALIKOTA DENPASAR,

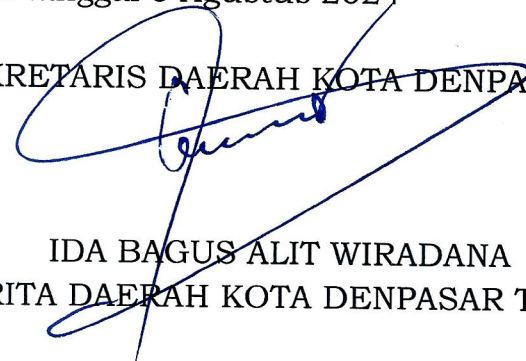


I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

9

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
4. RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
14. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
17. RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025

19. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
26. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR



Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebagai perangkat daerah yang membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang penanggulangan bencana, wajib menyusun dokumen perencanaan seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja utama dan pendanaan indikatif yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan penanggulangan kebencanaan kepada masyarakat. Renja yang sudah disusun yang akan menjadi pedoman atau acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025.

Sebagai akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan – masukan dan data – data yang diperlukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.

Denpasar, 5 Agustus 2024
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Denpasar



Drs. Ida Bagus Joni Ariwibawa, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 196806271988121002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra BPBD Kota Denpasar	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kota Denpasar	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Denpasar	22
2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025	25
Bab III Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kota Denpasar	32
3.3 Program dan Kegiatan BPBD Kota Denpasar Tahun 2025	33
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	37
4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 BPBD Kota Denpasar	37
Bab V Penutup.....	42



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	22
Tabel 2.3	Analisis SWOT BPBD Kota Denpasar	24
Tabel 2.4	Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Denpasar Tahun 2025	32
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	34
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang proses sistematisnya berkelanjutan yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) serta berpedoman Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah. Fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang dilaksanakan maupun yang akan datang dan sebagai alat ukur *outcome*/hasil yang harus dicapai, juga sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar (BPBD Kota Denpasar) yang merupakan salah satu dari Lembaga Teknis Daerah memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana, telah menyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 pada tanggal 24 September 2021, serta Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 mengacu pada RKPD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 dan juga berpedoman pada Perubahan Renstra BPBD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang telah disusun sebelumnya. Renja BPBD Kota Denpasar Tahun 2025 memuat rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan selama

tahun 2025 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Denpasar secara terperinci. Renja BPBD Kota Denpasar berupaya memadukan dan menselaraskan rencana kerja penanggulangan bencana nasional, provinsi, maupun kota dengan pertimbangan kondisi sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Denpasar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 14) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7

Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

- 15) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
- 16) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 59);
- 17) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
- 18) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 23);
- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar ini adalah sebagai penjabaran Renstra dan sebagai bentuk operasionalisasi strategi-strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar adalah :

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait perencanaan.
- 2) Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka

menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Denpasar.

- 3) Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan.
- 4) Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPBD Kota Denpasar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tahun 2025 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Denpasar**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra BPBD Kota Denpasar
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kota Denpasar
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Denpasar
- 2.4. Reviu Terhadap RKPD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025

**Bab III Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Denpasar**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kota Denpasar
- 3.3. Program dan Kegiatan BPBD Kota Denpasar Tahun 2025

Bab IV Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 BPBD Kota Denpasar

Bab V Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra BPBD Kota Denpasar

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Kota Denpasar tahun 2023 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Reviu terhadap evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPBD.

A. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2023 memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 10.899.718.422. Realisasi fisik sebesar 99,80% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 86,91% atau Rp 9.472.727.912. Hal ini karena adanya belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS yang belum dapat direalisasikan dan adanya pegawai yang pensiun di tahun 2023. Selain itu adanya pemisahan antara BPBD dan Damkar, sehingga terdapat mutasi pegawai ke Dinas Damkar dari BPBD.
- 2) Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tahun 2023 memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 220.793.152. Realisasi fisik sebesar 99,89% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 85,02% atau Rp 187.726.629. Hal ini karena adanya belanja bahan-bahan kimia yang tidak direalisasikan di tahun 2023.
- 3) Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tahun 2023 memiliki target kinerja 100% dengan

anggaran sebesar Rp 58.331.730. Realisasi fisik sebesar 71,64% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 23,06% atau Rp 13.450.000. Hal ini karena adanya belanja sewa excavator dan sewa alat besar darat lainnya yang bisa direalisasikan di tahun 2023 bila terjadi bencana.

- 4) Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tahun 2023 memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 228.655.620. Realisasi fisik sebesar 91,06% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 89,04% atau Rp 203.595.549. Hal ini karena beberapa barang / aset yang masih dalam kondisi baik, sehingga belum memerlukan perbaikan / pemeliharaan.
- 5) Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota tahun 2023 memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 102.587.002. Realisasi fisik sebesar 97,48% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 96,39% atau Rp 98.884.350. Hal ini karena beberapa belanja, seperti belanja makanan dan minuman rapat yang tidak direalisasikan pada tahun 2023.
- 6) Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) tahun 2023 memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 92.611.746. Realisasi fisik sebesar 99,78% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 96,81% atau Rp 89.657.440. Hal ini karena beberapa belanja, seperti Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos yang tidak direalisasikan pada tahun 2023.
- 7) Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota tahun 2023 memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 103.709.201. Realisasi fisik sebesar 97,35% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 95,78% atau Rp 99.328.350. Hal ini karena beberapa belanja, seperti belanja makanan dan minuman rapat yang tidak direalisasikan pada tahun 2023.

- 8) Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota tahun 2023 memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 1.175.120.880. Realisasi fisik sebesar 90,63% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 61,13% atau Rp 718.389.525. Hal ini karena beberapa belanja, seperti belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran, Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, dan Belanja Modal Alat Penolong yang tidak direalisasikan pada tahun 2023 Selain itu kondisi sarana prasarana yang ada masih dalam kondisi baik, sehingga belanja pemeliharaan yang sudah dianggarkan, ada yang tidak direalisasikan dan ada yang direalisasikan tidak sebesar yang dianggarkan.
- 9) Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota tahun 2023 memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 52.967.859. Realisasi fisik sebesar 65,26% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 64,27% atau Rp 34.041.150. Hal ini karena beberapa belanja, seperti belanja bahan-bahan bakar dan pelumas yang tidak direalisasikan pada tahun 2023.
- 10) Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota tahun 2023 memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 66.591.137. Realisasi fisik sebesar 99,75% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 96,78% atau Rp 64.448.144. Hal ini karena beberapa belanja, seperti belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos yang tidak direalisasikan pada tahun 2023.
- 11) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran tahun 2023 memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 78.922.528. Realisasi fisik sebesar 96,07% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 93,77% atau Rp

74.009.000. Hal ini karena beberapa belanja, seperti belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, dan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia yang tidak direalisasikan pada tahun 2023. Selain itu, pada perubahan 2023 telah dibentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, sehingga kegiatan maupun belanja yang berkaitan dengan program kebakaran tidak lagi dilaksanakan oleh BPBD Kota Denpasar di perubahan 2023.

B. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 166.153.350. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 100% atau Rp 166.153.350.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 6.140.536. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 88,58% atau Rp 5.439.000.
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 528.497.913. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 71,65% atau Rp 378.688.000.
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 276.750.000. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 59,72% atau Rp 165.263.000.
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 38.194.680. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 97,43% atau Rp 37.211.450.

- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 54.645.300. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 85,75% atau Rp 46.860.000.
- 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 244.485.000. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 96,74% atau Rp 236.525.000.
- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 358.240.000. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 69,28% atau Rp 248.183.231.
- 9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 8.440.041.039. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 95,97% atau Rp 8.100.207.205.
- 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 1.267.947.720. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 99,02% atau Rp 1.255.510.100.

- 11) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 285.200.000. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 99,71% atau Rp 284.379.696.
- 12) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 54.340.000. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 96,68% atau Rp 52.535.000.
- 13) Program Penanggulangan Bencana dengan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 36.250.000. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar 99,95% atau Rp 36.232.620.
- 14) Program Penanggulangan Bencana dengan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 172.386.806. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar 57,72% atau Rp 99.510.000.
- 15) Program Penanggulangan Bencana dengan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 52.516.015. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar 99,20% atau Rp 52.095.000.
- 16) Program Pencegahan, Penanggulungan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan

Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri memiliki target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 1.343.322.866. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar 29,68% atau Rp 398.688.850. Hal ini karena pada perubahan 2023 sudah dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, sehingga belanja-belanja yang akan direalisasikan di perubahan sudah tidak dilaksanakan lagi.

- C. Tidak terdapat realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang di rencanakan pada tahun 2023.
- D. Kebijakan / tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain :
- Mengidentifikasi kembali terhadap capaian realisasi pada tahun sebelumnya sebagai dasar dalam perencanaan target pada tahun berikutnya.
 - Melakukan reuiu terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sehingga kegiatan tersebut apakah perlu dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya atau tidak.
 - Menyesuaikan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan peraturan terkait, terutama kegiatan yang berkaitan dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal).
- E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar adalah :
- Belum tercapainya target kegiatan sesuai yang tertuang dalam renstra.
 - Tercapainya target kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan berdampak terhadap peningkatan pelayanan kebencanaan dan peningkatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.
- F. Kegiatan yang berbasis gender di 2023, seperti pada Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota sudah dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada sekolah dan juga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dari yang masih muda hingga beberapa lansia ikut hadir, agar dapat mengetahui langkah apa yang dilakukan bila terjadi bencana dan

mengetahui potensi dari bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut. Selain itu juga sudah dilaksanakannya simulasi evakuasi tsunami di Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, dengan melibatkan murid-murid di tingkat SD dan SMP di wilayah Kelurahan Serangan. Untuk pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), di BPBD Kota Denpasar sendiri, tim reaksi cepatnya sendiri juga ada yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini untuk memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan gender, jenis kelaminnya.

Berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.01	Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KESEKRETARIATAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedia gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang / Bulan	1 Tahun	78 Orang / Bulan	78 Orang / Bulan	100%	78 Orang / Bulan	78 Orang / Bulan	100%
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	1 Tahun	100 Paket	100 Paket	100%	100 Paket	100 Paket	100%
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
1.05.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Tahun	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.05.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1 Tahun	13 Paket	13 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
1.05.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	1 Tahun	7 Paket	7 Paket	100%	16 Paket	16 Paket	100%
1.05.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3500 Kotak	4 Paket	4 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
1.05.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Tahun	4 Paket	4 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
1.05.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	1 Tahun	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	36 Dokumen	36 Dokumen	100%
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket	35 Unit	35 Unit	100%	-	35 Unit	100%
1.05.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Tahun	23 Unit	23 Unit	100%	5 Unit	23 Unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	100%
1.05.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1 Tahun	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	100%
1.05.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	100%
1.05.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1 Tahun	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	100%
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	1 Tahun	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	30 Unit	100%
1.05.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit	1 Tahun	134 Unit	134 Unit	100%	134 Unit	134 Unit	100%
1.05.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 Unit	1 Paket	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
1.05.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	11 Unit	1 Tahun	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%
1.05.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	100%
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase daerah rawan bencana yang dibina 2. Persentase pelayanan Penanggulangan Bencana 3. Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	37,21% 100% 100%	32,56% 100% 100%	37,21% 100% 100%	32,56% 100% 100%	87,50% 100% 100%	41,86% 100% 100%	32,56% 100% 100%	87,50% 100% 100%
1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	100%
1.05.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan	5000 Orang	50 Orang	5000 Orang	5000 Orang	100%	1000 Orang	5000 Orang	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun								
1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.03.2.02.0014	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	100%
1.05.03.2.02.0017	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Dokumen	1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.05.03.2.02.0015	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit	1 Tahun	10 Unit	10 Unit	100%	50 Unit	50 Unit	100%
1.05.03.2.02.07	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	- Tersedianya laporan hasil Verifikasi - Tersedianya laporan Rencana rehabilitasi dan Rekontruksi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-	2 Dokumen	100%
1.05.03.2.02.0016	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	-	-	-	-	300 Orang	300 Orang	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
1.05.03.2.02.0008	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	60 Orang	-	40 Orang	40 Orang	100%	65 Orang	65 Orang	100%
1.05.03.2.02.0009	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	-	-
1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1 05 03 2.03 0003	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	100%
1 05 03 2.03 0009	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	100 Paket	100 Orang	100 Orang	100%	200 Orang	200 Orang	100%
1.05.03.2.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersedianya dokumen kebencanaan	-	-	-	-	-	100%	100%	100%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
1.05.03.2.04.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.05.03.2.04.0013	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Tingkat waktu tanggap (<i>Response time rate</i>) 2. Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	15 Menit 100%	9 Menit 100%	15 Menit 100%	7 Menit 100%	100% 100%	- -	- -	- -
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
1.05.04.2.01.0017	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%	-	-	-



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
1.05.04.2.04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
1.05.04.2.04.0001	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	100%	-	-	-	-	-	-
1.05.04.2.04.0002	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa / Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa / Kelurahan	100 Orang	2 Desa / Kelurahan	2 Desa / Kelurahan	100%	-	-	-



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kota Denpasar

Hasil evaluasi target pelayanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar didasarkan atas hasil pelaksanaan program/kegiatan, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis dari pencapaian target kinerja atas sasaran dan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar. Manajemen Bencana sebagai upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Risiko Bencana (IRB)			101,78	98,72	95,76	92,89	104,39	98,18	95,76	92,89	-
2.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>)	15 menit		15 menit	15 menit	-	-	9 menit	7,55 menit	-	-	-
3.	Persentase daerah rawan bencana yang dibina			32,56%	37,21%	41,86%	46,51%	18,60%	18,60%	41,86%	46,51%	-
4.	Persentase pelayanan penanggulangan bencana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
5.	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
6.	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Denpasar

Mengacu pada isu strategis nasional BNPB beserta Rencana Strategis BPBD Kota Denpasar, maka dapat ditetapkan isu - isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :



1. Penguatan kesiapsiagaan aparaturnya dan masyarakat menghadapi bencana.
2. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan kebakaran.

Khusus untuk pelayanan penanggulangan kebakaran, BPBD Kota Denpasar saat ini sudah tidak melaksanakan terkait pelayanan penanggulangan kebakaran. Hal ini dikarenakan pada Oktober 2023 telah dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar. Segala tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan, telah dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar. Sehingga, tugas dan fungsi BPBD Kota Denpasar saat ini melaksanakan 1 (satu) fungsi sebagai penanggulangan bencana. Dalam konteks pencegahan bencana (pra bencana), pada saat tanggap darurat dan penanganan pasca bencana, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Orientasi penanggulangan bencana pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana.
2. Legalitas kewenangan BPBD khususnya untuk penanganan kebakaran dan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) atau PSC (*Public Save Community*).
3. Masih belum optimalnya jangkauan pengembangan tim siaga bencana ditingkat instansi terkait, kecamatan maupun desa/kelurahan, para relawan bencana dan dunia usaha.
4. Belum semua petugas mendapatkan pelatihan mitigasi bencana, penggunaan sarana prasarana kebencanaan.
5. Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, sehingga peranan pemerintah lebih dominan dalam penanganan kebencanaan
6. Masih kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencegahan mengurangi resiko bencana.

7. Aspek sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas masih kurang memadai. Permasalahan yang dihadapi tersebut juga memiliki dampak terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional, salah satunya Indeks Risiko Bencana (IRB) yang diukur berdasarkan indikator-indikator dari Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi, maka dilakukan analisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya. Berikut analisis SWOT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar:

Tabel 2.3
Analisis SWOT BPBD Kota Denpasar

Internal	Eksternal
Kekuatan : 1. Sudah ada lembaga teknis (BPBD dan Dinas Damkar). 2. Tersedianya satuan tugas penanggulangan bencana (TRC) . 3. Sinergitas Perangkat Daerah, TNI, POLRI, Masyarakat dan Dunia Usaha.	Peluang : 1. Peraturan perundangan-undangan mengenai penanggulangan bencana sudah ada. 2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana sudah berjalan baik.
Kelemahan : 1. Belum tersosialisasinya Peta Daerah Rawan Bencana. 2. Belum optimalnya kompetensi SDM 3. Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan dini bencana.	Ancaman : 1. Mobilitas penduduk yang semakin meningkat. 2. Banyaknya pembangunan di daerah rawan bencana. 3. Adanya alih fungsi lahan yang semakin meningkat.

Melihat faktor – faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT diatas, maka dapat ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi diantaranya:

1. Perkembangan tingkat penduduk yang akan memicu pertambahan kebutuhan akan lahan pemukiman dan perumahan.
2. Masih banyaknya rumah yang dibangun oleh masyarakat tidak memenuhi peraturan tentang tata ruang Pemerintah Kota Denpasar.
3. Masih banyaknya jalur akses ke beberapa lokasi rawan bencana yang tergolong sulit karena jalannya sempit.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal/membangun di pemukiman daerah rawan bencana.
5. Masih terdapat keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

6. Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Dari tantangan tersebut diatas maka ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD Kota Denpasar, yaitu:

1. Penguatan landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana di daerah mengacu pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan resiko bencana dan penanganan bencana.
4. Adanya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan lingkungan.
5. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana.
6. Terus berkembangnya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif.
7. Optimalisasi pemulihan dampak bencana.

2.4 Reviu Terhadap RKPD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025

Proses yang dilakukan sebagai perbandingan RKPD dengan hasil kebutuhan bahwa usulan program dan kegiatan yang dirancang pada awal RKPD tahun anggaran 2025 terdiri dari 2 Program dengan 9 kegiatan dengan 24 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 16.707.833.504. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 ada yang melibatkan banyak masyarakat dari berbagai jenis kelamin, kelompok usia, dan juga beragam profesi, termasuk melibatkan dengan sekolah dan instansi pemerintah / swasta lainnya seperti Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana); Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 2.4
Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Denpasar	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KESEKRETARIATAN	100%	14.010.361.656	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Denpasar	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KESEKRETARIATAN	100%	14.010.361.656	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase Tersedia gaji dan tunjangan ASN	100%	9.376.754.950	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase Tersedia gaji dan tunjangan ASN	100%	9.376.754.950	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	9.376.754.950	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	9.376.754.950	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	769.735.100	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	769.735.100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.007.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.007.500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	143.810.600	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	143.810.600	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	373.695.600	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	373.695.600	

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	152.445.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	152.445.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	39.132.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	39.132.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	54.644.400	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	54.644.400	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	100%	77.875.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	100%	77.875.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	77.875.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	77.875.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.324.732.606	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.324.732.606	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	358.240.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	358.240.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	1.966.492.606	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	1.966.492.606	



	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%	1.461.264.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%	1.461.264.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	970.124.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	970.124.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	312.970.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	312.970.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	154.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	154.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	14 Unit	24.170.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	14 Unit	24.170.000	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Denpasar	1) Persentase daerah rawan bencana yang dibina. 2) Persentase pelayanan Penanggulangan Bencana. 3) Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.	46,51% 100% 100%	2.697.471.848	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Denpasar	1) Persentase daerah rawan bencana yang dibina. 2) Persentase pelayanan Penanggulangan Bencana. 3) Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.	46,51% 100% 100%	2.697.471.848	
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana	100%	148.849.440	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana	100%	148.849.440	



Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Denpasar	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang	148.849.440	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Denpasar	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang	148.849.440	
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Denpasar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	1.592.692.008	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Denpasar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	1.592.692.008	
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas tim reaksi cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Kota Denpasar	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	65 Orang	357.949.288	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas tim reaksi cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Kota Denpasar	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	65 Orang	357.949.288	
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	103.285.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	103.285.000	
Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	771.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	771.000.000	



Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	360.457.720	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	360.457.720	
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Denpasar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	100%	620.869.400	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Denpasar	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	100%	620.869.400	
Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	79.169.000	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	79.169.000	
Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	448.700.400	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	448.700.400	
Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Kota Denpasar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	93.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Kota Denpasar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	93.000.000	
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Denpasar	Persentase tersedianya dokumen kebencanaan	100%	335.061.000	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Denpasar	Persentase tersedianya dokumen kebencanaan	100%	335.061.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	194.990.000	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	194.990.000	



	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kota Denpasar	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	140.071.000	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kota Denpasar	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	140.071.000	
JUMLAH					16.707.833.504	JUMLAH					16.707.833.504



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana diintegrasikan kedalam RPJMN 2024-2029. Pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota perencanaan dan tindakan penanggulangan bencana menjadi pedoman dan acuan dalam bentuk perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Dimana dokumen kebencanaan yang ada (Rencana Penanggulangan Bencana) dipadukan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana apabila diintegrasikan dengan Kebijakan Nasional meliputi:

- a. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan perencanaan pembangunan.
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- c. Penjaminan pemenuhan hak warga negara yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- e. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN/APBD.
- f. Pemeliharaan arsip/dokumen autentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kota Denpasar

Tujuan Rencana Kerja BPBD Kota Denpasar Tahun 2025 dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana adalah seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Denpasar Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET RENSTRA TH. 2025	TARGET TH. 2024
Meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam menghadapi bencana.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana	92,89	95,76

3.3 Program dan Kegiatan BPBD Kota Denpasar Tahun 2025

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah visi misi dan program pembangunan Kota Denpasar periode tahun 2021-2026 sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar dikaitkan dengan tupoksi BPBD Kota Denpasar yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah yaitu :

VISI

***“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”
(Denpasar “Makmur, Aman, Jujur, dan Unggul”)***

MISI

1. ***Meningkatkan keMAKMURan masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.***
2. ***Menjaga stabilitas keAMANan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.***
3. ***KeJUJURan dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).***
4. ***UNGGUL dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.***
5. ***Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan keBUDAYAan Bali.***

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar mendukung **Misi Kedua: Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.** Misi ke 2 memiliki tujuan mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Berikut merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Denpasar di tahun 2025 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KESEKRETARIATAN	Kota Denpasar	100%	14.010.361.656			100%	15.469.164.520
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedia gaji dan tunjangan ASN	Kota Denpasar	100%	9.376.754.950			100%	7.503.122.059
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	35 Orang/Bulan	9.376.754.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Orang/Bulan	7.503.122.059
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar	100%	769.735.100			100%	908.947.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	1 Paket	6.007.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	6.619.250
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	10 Paket	143.810.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	168.317.160
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Denpasar	9 Paket	373.695.600	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		9 Paket	463.381.160
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	2 Paket	152.445.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		2 Paket	167.475.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar	3 Paket	39.132.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	43.045.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Denpasar	36 Dokumen	54.644.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Dokumen	60.109.830
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	Kota Denpasar	100%	77.875.000			100%	0
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar	10 Unit	77.875.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	0
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Denpasar	100%	2.324.732.606			100%	5.298.031.521
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar	3 Laporan	358.240.000	Pajak Rokok		3 Laporan	394.064.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	10 Laporan	1.966.492.606	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laporan	4.903.967.521
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	Kota Denpasar	100%	1.461.264.000			100%	1.759.063.340
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Denpasar	31 Unit	970.124.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		31 Unit	1.332.987.720
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar	68 Unit	312.970.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		68 Unit	280.735.620
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Denpasar	2 Unit	154.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	91.000.000

	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Denpasar	14 Unit	24.170.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Unit	54.340.000
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase daerah rawan bencana yang dibina. 2) Persentase pelayanan Penanggulangan Bencana. 3) Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.	Kota Denpasar	46,51% 100% 100%	2.697.471.848			46,51% 100% 100%	2.906.356.212
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana	Kota Denpasar	100%	148.849.440			100%	150.122.500
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Denpasar	1000 Orang	148.849.440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1000 Orang	150.122.500
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Denpasar	100%	1.592.692.008			100%	1.481.845.872
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas tim reaksi cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Kota Denpasar	65 Orang	357.949.288	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		65 Orang	271.823.750
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Denpasar	1 Dokumen	103.285.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	0
	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kota Denpasar	1 Laporan	771.000.000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		1 laporan	848.100.000
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Denpasar	1 Kawasan	360.457.720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kawasan	361.922.122
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	Kota Denpasar	100%	620.869.400			100%	938.166.240
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kota Denpasar	1 Dokumen	79.169.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		1 Dokumen	87.085.900
	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kota Denpasar	10 Orang	448.700.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	719.080.340
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Denpasar	200 Orang	93.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		200 Orang	132.000.000
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersedianya dokumen kebencanaan	Kota Denpasar	100%	335.061.000			100%	336.221.600



	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kota Denpasar	3 Dokumen	194.990.000	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3 Dokumen	213.163.500
	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Denpasar	2 Dokumen	140.071.000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2 Dokumen	123.058.100
Jumlah					16.707.833.504			18.375.520.732



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR

4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 BPBD Kota Denpasar

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2025 mengacu pada RKPD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 dan juga berpedoman pada Renstra BPBD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang telah disusun sebelumnya. Renja BPBD Kota Denpasar Tahun 2025 memuat rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 oleh sekretariat dan masing-masing bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Denpasar secara terperinci, dan juga untuk mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan target yang sudah ditetapkan. Adapun rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Denpasar pada tahun 2025, antara lain:

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KESEKRETARIATAN	100%	14.010.361.656
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedia gaji dan tunjangan ASN	100%	9.376.754.950
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	9.376.754.950
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	769.735.100
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.007.500

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	143.810.600
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	373.695.600
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	152.445.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	39.132.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	54.644.400
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	100%	77.875.000
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	77.875.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.324.732.606
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	358.240.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	1.966.492.606
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%	1.461.264.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	970.124.000

	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	312.970.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	154.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	14 Unit	24.170.000
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase daerah rawan bencana yang dibina. 2) Persentase pelayanan Penanggulangan Bencana. 3) Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.	46,51% 100% 100%	2.697.471.848
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana	100%	148.849.440
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang	148.849.440
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	1.592.692.008

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas tim reaksi cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	65 Orang	357.949.288
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	103.285.000
Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	771.000.000
Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	360.457.720
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	100%	620.869.400
Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	79.169.000
Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	448.700.400

	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	93.000.000
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersedianya dokumen kebencanaan	100%	335.061.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	194.990.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	140.071.000
Jumlah				16.707.833.504

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, dengan memperhatikan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan), kondisi masyarakat dan juga ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Renja BPBD Kota Denpasar Tahun 2025 memuat rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 sebagai penjabaran dari RKPD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 dan juga Renstra BPBD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan juga acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Denpasar secara terperinci. Selain itu juga Renja BPBD Kota Denpasar Tahun 2025 yang telah disusun ini, akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di tahapan perencanaan dan penganggaran berikutnya.

Diharapkan Renja BPBD Kota Denpasar Tahun 2025 dapat menjawab terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam 1 (satu) tahun kedepan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mendukung kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025, upaya pelaksanaan tugas dan fungsi dapat lebih terencana, terarah dan terukur demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel, serta memberikan pelayanan penanggulangan bencana sesuai dengan harapan masyarakat Kota Denpasar.

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA